



Integration of Local Wisdom and Adaptive Public Leadership in Promoting Local Potential-Based Regional Development

Integrasi Kearifan Lokal dan Kepemimpinan Publik Adaptif dalam Mendorong Pembangunan Daerah Berbasis Potensi Lokal



Salamun ^a
Edi Susilo ^b

Article history:

Submitted: 16 April 2026

Revised: 11 May 2026

Accepted: 11 June 2026

Keywords:

local wisdom; adaptive public leadership; development based on local potential; regional governance; sustainable development.

Abstract

This study aims to examine how integrating local wisdom and flexible public leadership fosters successful regional development driven by local potential. The research was conducted in Banyuwangi Regency (East Java), Sleman Regency (Special Region of Yogyakarta), and Badung Regency (Bali)—areas selected for their relatively successful regional development practices in optimizing local potential. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews with traditional leaders, local government heads, officials, and community members involved in the development process. Secondary data—comprising regional planning and development documents, annual performance and development reports, and official publications from relevant agencies—complemented the primary data. Thematic analysis was used to identify patterns of relationships among local values, leadership characteristics, community engagement, and development sustainability. The findings indicate that the success of development based on local potential depends not merely on the volume of available resources, but primarily on how effectively local governments integrate local cultural values and knowledge into development governance through responsive, collaborative, innovative, and flexible leadership. Patterns observed across all three regions included strengthened community participation, enhanced social resilience, the emergence of context-specific policy innovations, and the maintenance of economic and environmental sustainability. The study demonstrates that the synergy between local wisdom and flexible public leadership is a strategic component in establishing regional development governance that is rooted in local characteristics yet responsive to external dynamics. This integration offers an alternative model for regional development that is more contextual, inclusive, adaptive, and sustainable in the face of global challenges and multidimensional crises.

^a Universitas Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia

^b Universitas Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia

Kata Kunci :

kearifan lokal; kepemimpinan publik adaptif; pembangunan berbasis potensi lokal; tata kelola daerah; pembangunan berkelanjutan.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana integrasi kearifan lokal dan kepemimpinan publik yang fleksibel berfungsi sebagai cara untuk mendorong keberhasilan pembangunan daerah yang bergantung pada potensi lokal. Studi ini dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Badung, Bali. Kabupaten-kabupaten ini dipilih karena menunjukkan praktik pembangunan daerah yang relatif berhasil dalam mengoptimalkan potensi lokal. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, kepala daerah, pejabat pemerintah, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan. Dokumen perencanaan dan pembangunan daerah, laporan kinerja dan pembangunan tahunan, dan publikasi resmi instansi terkait menyediakan data sekunder yang mendukung data primer. Data dianalisis secara tematik untuk menemukan pola hubungan antara nilai lokal, sifat kepemimpinan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan berbasis potensi lokal tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya yang tersedia, tetapi terutama pada seberapa baik pemerintah daerah mengintegrasikan nilai dan pengetahuan budaya lokal ke dalam tata kelola pembangunan melalui kepemimpinan yang responsif, kolaboratif, inovatif, dan fleksibel. Penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan ketahanan sosial, lahirnya inovasi kebijakan kontekstual, dan terjaganya kesinambungan ekonomi dan lingkungan adalah pola yang terlihat hampir sama di ketiga wilayah tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara kearifan lokal dan kepemimpinan publik yang fleksibel merupakan komponen strategis dalam membangun tata kelola pembangunan daerah yang berakar pada ciri-ciri lokal dan responsif terhadap dinamika eksternal. Integrasi ini dapat digunakan sebagai model alternatif untuk pembangunan daerah yang lebih kontekstual, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global dan krisis yang memiliki berbagai dimensi.

Journal of Social Science and Humanities (JoSSH) ©2026.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Corresponding author:

Salamun

Universitas Ratu Samban, Bengkulu, Indonesia

Email address: salamunharis18@gmail.com

1 Pendahuluan

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing wilayah di tengah dinamika globalisasi, salah satu agenda strategis adalah pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan berbasis potensi lokal adalah pendekatan yang relevan dalam konteks ini, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki keragaman sumber daya alam dan budaya serta karakteristik sosial-ekonomi antardaerah. Pendekatan ini menempatkan sumber daya dan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya sebagai dasar untuk perumusan kebijakan pembangunan yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan (Sugiantiningsih et al., 2023).

Pembangunan yang didasarkan pada potensi lokal tidak hanya bergantung pada seberapa banyak sumber daya yang tersedia di daerah, tetapi juga pada seberapa baik kepemimpinan publik menemukan, mengawasi, dan mengembangkan potensi tersebut. Pemimpin publik tidak hanya harus mahir dalam administrasi dan manajemen; mereka juga harus memahami sifat sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang mereka pimpin. Dalam situasi seperti ini, kearifan lokal merupakan salah satu sumber nilai penting untuk kepemimpinan yang efektif. Kearifan lokal adalah kumpulan nilai, norma, pengetahuan, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan berkembang melalui pengalaman kolektif masyarakat dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan berbagai masalah di lingkungannya. Ketika prinsip-prinsip ini dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan publik, kebijakan yang dibuat dapat lebih diterima dan diakui oleh masyarakat. Menurut Hidayat, (2018), penerapan prinsip kearifan lokal dalam kepemimpinan publik dapat sangat penting untuk mendorong inovasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, karena kompleksitas lingkungan pemerintahan modern, para pemimpin publik harus mempertimbangkan lebih dari sekedar prinsip lokal. Kepemimpinan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan transformasi yang cepat di bidang sosial, ekonomi, politik, teknologi, dan informasi. Kondisi ini membuat kepemimpinan adaptif menjadi pendekatan yang semakin penting dalam tata kelola pembangunan daerah. Menurut Sunyoto (2022), kepemimpinan adaptif menekankan kemampuan pemimpin untuk mempertahankan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat sambil tetap fleksibel, inovatif, dan responsif terhadap perubahan dan tantangan. Adaptivitas, oleh karena itu, tidak berarti mengabaikan tradisi lokal. Sebaliknya, itu berarti kemampuan untuk mengaktualisasikan prinsip-prinsip tersebut agar tetap relevan saat menghadapi perubahan lingkungan pembangunan.

Kajian pembangunan berbasis potensi lokal dan kepemimpinan adaptif telah berkembang, tetapi masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas bagaimana nilai kearifan lokal digabungkan dengan kepemimpinan adaptif. Meskipun demikian, kedua ide tersebut memiliki sifat yang saling melengkapi. Kepemimpinan adaptif memungkinkan perubahan melalui pembelajaran, inovasi, kerja sama, dan penyesuaian strategi, sedangkan kearifan lokal memberikan landasan etika, norma sosial, dan legitimasi budaya untuk praktik kepemimpinan. Dengan mengintegrasikan keduanya, pola kepemimpinan yang mampu merespons perubahan dari luar tanpa kehilangan nilai sosial dan budaya komunitasnya dapat diciptakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi pembangunan yang didasarkan pada potensi daerah, kepemimpinan adaptif dan kearifan lokal dapat dianggap sebagai opsi konseptual (Kariada, 2021).

Integrasi dapat digunakan dalam pembangunan daerah untuk menciptakan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang lebih partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, prinsip kepemimpinan adaptif seperti musyawarah, gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif dapat digabungkan dengan prinsip kearifan lokal seperti tanggung jawab kolektif, musyawarah, dan gotong royong. Sinergi ini memungkinkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus membuat mereka lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian dan krisis. Paradigma pembangunan partisipatif juga mendukung pendekatan ini. Paradigma ini melihat masyarakat sebagai aktor aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, daripada hanya menerima kebijakan (Afriyansyah, 2018).

Kearifan lokal, kepemimpinan adaptif, dan pembangunan berbasis potensi daerah harus dihubungkan secara lebih terintegrasi, menurut penjelasan tersebut. Studi seperti ini penting karena pembangunan daerah membutuhkan kemampuan pemerintah untuk mengelola modal sosial, nilai, dan identitas yang hidup di dalam masyarakat serta kemampuan untuk menanggapi perubahan dari luar. Kebijakan pembangunan berisiko kehilangan relevansi sosial jika tidak ada hubungan antara kemampuan adaptasi dan konteks lokal. Sebaliknya, bergantung pada pola tradisional tanpa kemampuan beradaptasi juga dapat membatasi kemampuan daerah untuk menanggapi perubahan lingkungan yang semakin kompleks.

Melalui penciptaan model integratif antara kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif dalam pembangunan berbasis potensi daerah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam praktik kepemimpinan publik yang adaptif, serta untuk menemukan cara-cara untuk meningkatkan sinergi antara keduanya. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembicaraan tentang pembangunan daerah dan kepemimpinan dengan mempertimbangkan aspek budaya dalam adaptasi pemimpin. Secara praktis, hasilnya diharapkan dapat membantu pemangku kebijakan membuat strategi pembangunan yang lebih kontekstual, responsif, partisipatif, dan berkelanjutan (H. Y. Hidayat et al., 2020).

Oleh karena itu, kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif harus diintegrasikan dalam proses pembangunan daerah sebagai kebutuhan strategis. Kemampuan pemimpin untuk memadukan nilai-nilai masyarakat dengan kemampuan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi semakin penting di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan global dan beragamnya karakteristik lokal Indonesia. Diharapkan model kepemimpinan ini dapat membantu pembangunan daerah yang responsif terhadap perubahan dan berkelanjutan, inklusif, dan berakar pada potensi dan identitas lokal.

2 Metodologi Penelitian

Untuk mempelajari bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif terintegrasi dalam pembangunan berbasis potensi daerah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang luas tentang dinamika sosial, budaya, kepemimpinan, dan kebijakan pembangunan dalam konteks kehidupan masyarakat secara alamiah. Penelitian dilakukan di tiga kabupaten di Provinsi Jawa Tengah: Wonosobo, Banyumas, dan Grobogan. Ketiga wilayah tersebut dipilih karena masing-masing memiliki karakteristik sosial dan budaya yang kuat. Mereka juga menunjukkan praktik pembangunan yang memanfaatkan potensi lokal melalui partisipasi masyarakat yang responsif dan kepemimpinan yang kuat. Selain itu, mereka dianggap relevan sebagai lokasi penelitian karena memiliki pengalaman dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya.

Data primer dan sekunder terdiri dari penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam (wawancara mendalam) dengan informan penting yang dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dan pengetahuan mereka tentang proses pembangunan daerah. Lima tokoh adat, tiga kepala daerah, dan sepuluh warga yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah informan penelitian. Fokus wawancara adalah untuk mengetahui tentang prinsip kearifan lokal yang digunakan dalam pembangunan, sifat kepemimpinan adaptif, pola partisipasi masyarakat, dan cara nilai budaya dan praktik kepemimpinan mengintegrasikan pengambilan keputusan publik.

Data awal dikumpulkan melalui observasi partisipatif selain wawancara. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman secara langsung tentang praktik sosial, interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dan bagaimana nilai-nilai lokal diterapkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Wawancara terutama mengenai praktik kolektif, komunikasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan pembahasan. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumentasi berbagai sumber pendukung, termasuk berbagai dokumen resmi pemerintah daerah. Dokumen yang dianalisis termasuk laporan tahunan pemerintah daerah, dokumen kebijakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan hasil evaluasi internal dan eksternal terhadap pelaksanaan program pembangunan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, sekaligus memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan bagaimana potensi lokal dapat dikembangkan di masing-masing daerah.

Model analisis interaktif Miles dan Huberman digunakan untuk melakukan analisis data, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, informasi yang diperoleh dari observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi dipilih, dikategorikan, dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi, kategori tematik, dan hubungan antarkonsep untuk tujuan analisis. Triangulasi metode dan sumber digunakan untuk menjaga keabsahan data. Triangulasi sumber membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh adat, kepala daerah, masyarakat, dan dokumen pemerintah; triangulasi metode membandingkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan konsistensi hasil penelitian. Selanjutnya, hasil keseluruhan dari proses analisis digunakan sebagai dasar untuk membuat model konseptual yang mengintegrasikan kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, kontekstual, dan partisipatif.

3 Hasil dan Pembahasan

Integrasi Kearifan Lokal dan Kepemimpinan Adaptif sebagai Pilar Pembangunan

Saat ini, pembangunan daerah menghadapi masalah yang semakin kompleks dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kondisi ini menuntut pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan tetapi juga mempertimbangkan karakteristik, sumber daya, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat lokal. Salah satu pendekatan strategis dalam kerangka ini adalah pembangunan berbasis potensi lokal. Pendekatan ini menempatkan kekuatan internal daerah sebagai dasar untuk merancang

kebijakan dan program pembangunan yang kontekstual, inklusif, dan partisipatif. Kemampuan pemerintah daerah untuk menggabungkan prinsip kearifan lokal dengan pendekatan kepemimpinan publik yang inovatif adalah salah satu komponen yang memastikan metode ini berhasil. Kearifan lokal memperkuat legitimasi dan penerimaan kebijakan pembangunan melalui landasan norma sosial, nilai, dan identitas budaya. Sementara itu, kepemimpinan adaptif memungkinkan pemimpin daerah untuk beradaptasi dan kreatif dengan perubahan lingkungan, tuntutan masyarakat, dan dinamika sosial-ekonomi. Menggabungkan kedua komponen ini memungkinkan pembangunan yang tetap berakar pada identitas lokal dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat.

Fokus penelitian ini adalah Kabupaten Banyuwangi di Jawa Timur, Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Badung di Bali. Ketiga daerah ini dipilih karena masing-masing menunjukkan praktik pembangunan yang memanfaatkan potensi lokal sambil mempertahankan identitas sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, masing-masing daerah menunjukkan praktik kepemimpinan yang cukup kreatif dan responsif dalam mengelola potensi lokal dan memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat. Kearifan lokal, kepemimpinan adaptif, dan pembangunan berbasis potensi daerah adalah tiga faktor yang membuat ketiga wilayah ini menarik untuk dipelajari sebagai studi kasus.

Tidak hanya pencapaian pembangunan yang dipertimbangkan saat memilih lokasi penelitian, tetapi juga bagaimana nilai adat, sifat sosial-budaya, partisipasi masyarakat, dan gaya kepemimpinan memengaruhi proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perspektif ini penting karena pembangunan daerah tidak hanya dapat diukur melalui peningkatan indikator ekonomi; itu juga dapat diukur melalui kemampuan daerah untuk meningkatkan ketahanan sosial, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mempertahankan identitas budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk mengidentifikasi pola persamaan dan perbedaan dalam penerapan nilai-nilai lokal dan karakteristik kepemimpinan adaptif di ketiga daerah. Perbandingan ini digunakan untuk memahami bagaimana konteks sosial dan budaya yang berbeda dapat memengaruhi strategi pembangunan dan bentuk adaptasi kepemimpinan di masing-masing wilayah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan praktik pembangunan secara eksplisit.

Pada akhirnya, adalah mungkin untuk memahami kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif sebagai komponen strategis dalam membangun tata kelola pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Kepemimpinan adaptif memungkinkan pemerintah merespons perubahan dan menciptakan inovasi dalam pengelolaan pembangunan, sedangkan nilai lokal menjaga identitas, legitimasi sosial, dan keterlibatan masyarakat. Karena keduanya mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang dan memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat, sinergi keduanya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih luas.

Kabupaten Banyuwangi: Sinergi Gotong Royong, Inovasi, dan Tata Kelola Adaptif

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam mengintegrasikan potensi lokal, nilai-nilai kearifan masyarakat, inovasi kebijakan publik, dan kepemimpinan yang adaptif dalam proses pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut didukung oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola nilai-nilai sosial seperti gotong royong, partisipasi masyarakat, serta identitas budaya lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan. Pada saat yang sama, kepemimpinan yang responsif dan inovatif turut mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Sinergi antara kekuatan budaya lokal dan kapasitas kepemimpinan tersebut memberikan dampak terhadap perkembangan berbagai sektor pembangunan, sekaligus memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu contoh praktik pembangunan daerah berbasis potensi lokal di Indonesia.

Kabupaten Banyuwangi, yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, memiliki sumber daya alam yang beragam dan budaya yang luar biasa. Identitas budaya Using, bersama dengan potensi alam seperti pesisir, pegunungan, dan hutan tropis, yang mendukung pengembangan berbagai sektor pembangunan di Banyuwangi, merupakan salah satu karakteristik utama masyarakat. Selain keindahan alam dan budayanya, Banyuwangi juga memiliki kekuatan sosial yang kuat, terutama berkat kebiasaan gotong royong yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini menunjukkan cara kerja kolektif, solidaritas, dan partisipasi sosial, yang sangat penting untuk memperkuat kohesi masyarakat dan membantu menjalankan berbagai program pembangunan.

Nilai-nilai tradisional ini telah berkembang menjadi bagian dari identitas budaya dan dimasukkan ke dalam perubahan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pembangunan di Banyuwangi telah menunjukkan pola kepemimpinan yang fleksibel, kreatif, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat sejak masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas dan sekarang Bupati Ipuk Fiestiandani. Keterbukaan terhadap ide-ide baru, kemampuan untuk menyesuaikan metode pembangunan dengan perubahan lingkungan, dan fokus pada mencapai hasil pembangunan yang bermanfaat bagi berbagai kelompok masyarakat adalah ciri-ciri karakter tersebut.

Ekosistem pembangunan yang mendukung inovasi dan partisipasi masyarakat juga terbentuk oleh kombinasi modal sosial berbasis kearifan lokal dan kepemimpinan yang adaptif. Masyarakat dilihat dalam kerangka ini tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai aktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan berbagai inisiatif daerah. Oleh karena itu, pengalaman Banyuwangi menunjukkan bahwa meningkatkan nilai budaya lokal bersama dengan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dan berinovasi dapat menjadi salah satu landasan penting untuk membangun daerah yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adalah salah satu contoh integrasi antara kearifan lokal dan inovasi pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Metode ini terutama digunakan di sekitar kawasan konservasi strategis seperti Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Meru Betiri, dan Gunung Ijen. Masyarakat tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengembangkan ekowisata, dan memanfaatkan layanan lingkungan secara lebih bertanggung jawab. Pola tersebut menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan sumber daya alam berubah dari pendekatan sentralistik ke pendekatan yang lebih berbasis masyarakat lokal dan lebih berpartisipasi (Ari Atu Dewi, 2018). Pengelolaan berbasis masyarakat menggabungkan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan ekologi. Dari perspektif ekonomi, pengembangan ekowisata dan aktivitas berbasis jasa lingkungan dapat menawarkan peluang bisnis dan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat di sekitarnya. Dari perspektif sosial dan budaya, keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan mempertahankan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat bukan hanya menjaga lingkungan tetapi juga menghasilkan keuntungan sosial dan ekonomi yang lebih seimbang.

Selain sektor lingkungan, inovasi pembangunan di Banyuwangi juga terlihat dalam penggunaan teknologi digital. Program "Smart Kampung" adalah contoh digitalisasi layanan publik berbasis desa yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan dan informasi, terutama bagi daerah yang jauh dari pusat administrasi. Dalam pelayanan desa, teknologi memungkinkan proses administrasi dilakukan secara lebih cepat, terintegrasi, dan mudah digunakan. Program tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan tata kelola pelayanan publik dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan lokal. Ini dilakukan dalam konteks kepemimpinan adaptif.

Sebaliknya, upaya untuk memperkuat identitas budaya lokal sedang dilakukan seiring dengan modernisasi tata kelola. Pemerintah daerah dan masyarakat terus bekerja sama untuk mengembangkan berbagai potensi seni dan budaya lokal, seperti Tari Gandrung, batik Using, dan tradisi Barong Ider Bumi. Unsur-unsur budaya ini tidak hanya dipertahankan sebagai warisan tradisional, tetapi juga menjadi bagian dari identitas daerah, bisnis kreatif, dan daya tarik pariwisata. Penyelenggaraan berbagai kegiatan dan festival budaya juga memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pelestarian tradisi dan memperoleh keuntungan finansial dari pertumbuhan industri pariwisata berbasis budaya.

Pembangunan di Banyuwangi tidak sepenuhnya memisahkan modernisasi dari nilai-nilai lokal karena ada sinergi antara pemanfaatan teknologi, pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat, dan pelestarian budaya. Sebaliknya, inovasi dibuat dengan mempertimbangkan identitas, keterlibatan, dan potensi masyarakat. Pola ini menunjukkan cara kepemimpinan adaptif dapat menghubungkan kebutuhan untuk menanggapi perubahan dengan upaya untuk mempertahankan kearifan lokal sebagai dasar pembangunan daerah yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pola pengambilan keputusan Kabupaten Banyuwangi yang menekankan musyawarah dan partisipasi masyarakat menunjukkan kepemimpinan adaptif. Pemerintah daerah berusaha menggabungkan pendekatan "top-down" dan "bottom-up" untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan didasarkan pada kebutuhan, keinginan, dan kondisi nyata masyarakat. Musyawarah desa membantu menyatukan masukan masyarakat dan menyelaraskan prioritas pembangunan lokal dengan kebijakan pembangunan daerah secara lebih luas. Kemampuan pemerintah daerah untuk menangani berbagai perubahan dan masalah sosial juga menunjukkan karakter adaptif mereka. Respons kebijakan yang tidak seragam diperlukan untuk dinamika seperti migrasi tenaga kerja, efek pandemi COVID-19, dan konflik penguasaan dan pemanfaatan lahan. Pemerintah daerah harus mengubah pendekatan mereka sesuai dengan jenis masalah, orang-orang yang terlibat, dan kondisi sosial masyarakat. Dialog, musyawarah, dan partisipasi berbagai pihak menjadi mekanisme penting untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama dalam situasi ini. Prinsip kepemimpinan adaptif terkait dengan nilai lokal seperti kekeluargaan, gotong royong, dan penyelesaian masalah secara kolektif, menurut pendekatan ini.

Kepemimpinan adaptif melibatkan peningkatan kapasitas aparatur di tingkat desa selain meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Perangkat desa memerlukan pelatihan dan peningkatan kompetensi agar aparatur lokal mampu mengelola pelayanan publik, memahami dinamika pembangunan, dan menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Perangkat desa yang memadai dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan lokal sekaligus memperpendek jarak respons antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, kepemimpinan adaptif di Banyuwangi menunjukkan kemampuan pemimpin untuk menghasilkan inovasi serta partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, respons terhadap masalah sosial, dan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah lokal. Dengan kombinasi keduanya, pola kepemimpinan yang lebih responsif terhadap perubahan sambil mempertahankan nilai-nilai sosial yang sudah ada di masyarakat dapat dihasilkan. Pola ini sangat penting untuk pembangunan berbasis potensi daerah karena memungkinkan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan secara lebih kontekstual, bekerja sama, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Sleman: Nilai Musyawarah Desa dan Pelestarian Alam dalam Pemerintahan Inklusif

Kabupaten Sleman, di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan praktik pembangunan yang menggabungkan kearifan lokal dengan kepemimpinan adaptif. Karakter lereng Gunung Merapi memengaruhi kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan dan pentingnya partisipasi publik. Pemerintah daerah dapat menangani berbagai tantangan pembangunan secara lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan dengan menggabungkan tradisi musyawarah dengan inovasi tata kelola. Karena lokasinya di sekitar Gunung Merapi, karakter sosial dan lingkungan Kabupaten Sleman sangat ditentukan oleh hubungannya dengan alam. Situasi ini membentuk kesadaran ekologis, yang tercermin dalam filosofi Jawa

yang dikenal sebagai "Hamemayu Hayuning Bawono", yang merupakan prinsip untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Dalam pembangunan, mitigasi bencana, dan aktivitas sosial-ekonomi di lereng Merapi, prinsip ini ditanamkan.

Sebaliknya, orang-orang Sleman sangat terbuka terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kapasitas lokal. Pemanfaatan metode dan teknologi baru yang sesuai dengan prinsip sosial, budaya, dan keberlanjutan lingkungan cenderung diterima. Pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Sleman didorong oleh kombinasi kearifan tradisional dengan keterbukaan terhadap inovasi. Salah satu alat penting untuk pembangunan partisipatif di Kabupaten Sleman adalah musyawarah desa. Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan unsur pemerintahan desa terlibat dalam forum ini untuk menyampaikan aspirasi dan membuat keputusan bersama. Perencanaan pembangunan bukan satu-satunya tanggung jawabnya; dia juga menangani bencana, mengelola fasilitas publik, dan menyusun tata ruang. Proses deliberatif meningkatkan legitimasi kebijakan dan menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan risiko berbasis komunitas, evakuasi, dan peringatan dini sangat penting dalam mitigasi bencana Gunung Merapi. Selain itu, kearifan lokal memengaruhi cara masyarakat melihat dunia dan lingkungannya, seperti yang ditunjukkan oleh praktik budaya yang menekankan keharmonisan antara manusia, lingkungan, dan kepercayaan lokal. Pembangunan Sleman menunjukkan karakter yang adaptif, kerja sama, dan berorientasi pada ketahanan wilayah karena mengintegrasikan pengetahuan lokal, partisipasi masyarakat, dan pendekatan ilmiah dalam mitigasi bencana (Kurnia et al., 2023).

Kepemimpinan desa di Kabupaten Sleman menunjukkan sifat transformasional yang tidak hanya berfokus pada tugas administratif tetapi juga dapat mendorong perubahan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa membantu pembangunan dengan membangun desa digital, wisata, dan tangguh bencana. Inovasi ini menunjukkan upaya pemerintah desa untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Melalui pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerintah Kabupaten Sleman juga membantu meningkatkan kepemimpinan desa. Kemampuan manajemen yang lebih baik, kemampuan adaptasi, dan efektivitas pelaksanaan inovasi di tingkat lokal meningkat sebagai hasil dari dukungan ini. Selain itu, sinergi antara kepemimpinan desa yang transformasional dan dukungan pemerintah kabupaten meningkatkan mekanisme musyawarah dan partisipasi masyarakat, serta proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan beradaptasi dengan konteks lokal. Oleh karena itu, model kepemimpinan Sleman menunjukkan bahwa transformasi pembangunan dapat berjalan seiring dengan memperkuat kearifan lokal. Pembangunan desa yang adaptif, kontekstual, dan berkelanjutan bergantung pada kombinasi inovasi, kapasitas kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Kabupaten Badung: Adat Bali, Awig-Awig, dan Kepemimpinan Inovatif dalam Sektor Pariwisata

Kabupaten Badung, Bali, menunjukkan integrasi antara pembangunan modern dan pelestarian nilai-nilai lokal dalam tata kelola. Di tengah pertumbuhan pariwisata dan globalisasi, keberadaan "awig-awig" sebagai hukum adat dan peran desa adat memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan identitas budaya masyarakat. Pada saat yang sama, kepemimpinan adaptif dan inovasi kebijakan memungkinkan pemerintah daerah menanggapi perkembangan tanpa mengabaikan nilai lokal. Dengan bekerja sama, Badung dapat mempertahankan budaya dan karakter lokalnya sambil mengembangkan pariwisata. Kabupaten Badung, salah satu pusat pariwisata utama Indonesia, menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pembangunan modern dengan mempertahankan identitas budaya lokal. Awig-awig, hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pengelolaan lingkungan, pengembangan kawasan pariwisata, dan penggunaan lahan, adalah landasan penting dalam menjaga keseimbangan ini. Awig-awig memungkinkan pembangunan terus berlangsung sesuai dengan nilai dan norma adat yang berlaku.

Desa adat juga memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan sosial dan budaya masyarakat Badung di tengah pergeseran zaman. Selain menjaga tradisi, lembaga ini mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Pembangunan daerah yang lebih kontekstual juga dipengaruhi oleh keterlibatan desa adat dalam pengelolaan urusan sosial, budaya, dan keagamaan. Oleh karena itu, kemajuan pariwisata Badung tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga konsistensi dalam mempertahankan "awig-awig" dan meningkatkan peran desa adat dalam tata kelola pembangunan yang didasarkan pada kearifan lokal.

Konsep Tri Hita Karana, filosofi Hindu Bali yang menekankan keharmonisan antara manusia, alam, dan Tuhan, juga memengaruhi pembangunan di Kabupaten Badung. Salah satu landasan untuk pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola kawasan pariwisata adalah nilai ini. Dalam kenyataannya, pemerintah daerah bekerja sama dengan desa adat dan bisnis pariwisata untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan menjaga kawasan suci, mengelola limbah, menjaga keindahan dan nilai budaya Bali.

Dengan menyelenggarakan festival budaya, merevitalisasi pura, dan mengajarkan wisatawan tentang kebiasaan dan adat setempat, upaya menjaga keberlanjutan budaya dan ekonomi lokal dilakukan. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelestarian budaya, tetapi juga merupakan bagian dari pengembangan pariwisata yang lebih bertanggung jawab dan berbasis identitas lokal (Perdana, 2019). Pengelolaan sampah berbasis desa adat adalah contoh integrasi antara kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif. Pendekatan ini memungkinkan desa untuk mengelola sampah sesuai dengan nilai lokal dan mendorong pemerintah daerah untuk mengurangi limbah, termasuk plastik. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan lingkungan dapat dilakukan seiring dengan penguatan kelembagaan adat, sehingga desa adat dapat berfungsi sebagai penjaga budaya dan juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan pariwisata.

Melalui peran kepala daerah yang mendorong kerja sama antara pihak, kepemimpinan Kabupaten Badung menunjukkan sifat fleksibel dan terbuka. Pemerintah daerah tidak hanya membuat keputusan, tetapi juga membantu pemerintah, desa adat, pengusaha pariwisata, dan masyarakat lainnya berbicara satu sama lain. Metode ini memungkinkan proses pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang lebih partisipatif dan berbasis konsensus. Dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berkembang di wilayah pariwisata, metode ini memungkinkan proses pembangunan dilakukan melalui mekanisme yang lebih partisipatif. Penguatan kapasitas aparatur adalah bagian penting dari pendekatan kepemimpinan ini. Pemerintah daerah mendorong ASN untuk meningkatkan kemampuan reflektif, strategis, dan adaptifnya untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan dan menghasilkan solusi inovatif. Pada saat yang sama, kerja sama antara pemerintah kabupaten dan desa adat dimasukkan ke dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan secara rutin.

Perkembangan pariwisata internasional mendorong kepercayaan masyarakat, partisipasi publik, dan pelestarian nilai budaya. Sinergi antara kelembagaan adat dan kepemimpinan adaptif juga membantu menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih berkelanjutan yang mengimbangi keuntungan finansial, kelestarian lingkungan, dan pelestarian identitas budaya lokal.

Analisis Komparatif dan Sintesis

Studi kasus di Kabupaten Banyuwangi, Sleman, dan Badung menunjukkan bahwa kombinasi kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif mendukung pembangunan berbasis potensi lokal. Terlepas dari perbedaan budaya dan geografis, ketiga wilayah tersebut menunjukkan tiga pola utama yang hampir sama. Pertama, kearifan lokal berfungsi sebagai landasan untuk pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan publik. Nilai gotong royong di Banyuwangi mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono di Sleman menempatkan pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana sebagai prioritas utama. Sementara itu, di Badung, "awig-awig" menjadi referensi penting

untuk manajemen tata ruang dan pariwisata. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai budaya lokal berperan sebagai identitas sosial dan norma yang mendukung legitimasi kebijakan dan keberlanjutan pembangunan.

Inovasi, partisipasi, dan kepercayaan publik meningkat berkat kepemimpinan adaptif. Ini ditunjukkan di Banyuwangi dengan pengembangan "Smart Kampung", di Sleman dengan inovasi desa digital dan desa tangguh bencana, dan di Badung dengan kerja sama pemerintah dengan desa adat dalam pengelolaan lingkungan dan pariwisata. Pola ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang toleran terhadap perubahan dan terbuka terhadap keinginan masyarakat dapat membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Ketiga, ekosistem pembangunan yang menggabungkan kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif membuatnya mampu merespons perubahan tanpa kehilangan identitas lokal. Kepemimpinan adaptif memungkinkan inovasi, kerja sama, dan penyesuaian kebijakan terhadap dinamika pembangunan, sedangkan kearifan lokal memberikan dasar nilai dan legitimasi sosial. Sinergi keduanya mendorong pembangunan yang mencakup peningkatan ekonomi, pelestarian lingkungan, penguatan budaya, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal masing-masing, model integratif ini dapat digunakan sebagai referensi untuk daerah lain.

Pembangunan daerah berbasis potensi lokal didukung oleh sinergi antara kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif, menurut penelitian yang dilakukan di Banyuwangi, Sleman, dan Badung. Nilai tradisional membentuk identitas budaya dan mendorong inovasi, partisipasi, dan keberlanjutan pembangunan. Kepemimpinan yang fleksibel dan transformasional memperkuat nilai gotong royong dan budaya menggunakan di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan ekowisata, digitalisasi layanan melalui program Smart Kampung, dan pemberdayaan masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah semua contoh integrasi. Tradisi musyawarah dan nilai-nilai masyarakat lereng Merapi di Kabupaten Sleman berfungsi sebagai dasar untuk membangun partisipasi dan ketahanan wilayah. Mitigasi bencana yang efektif, partisipasi masyarakat, dan peningkatan potensi ekonomi lokal didukung oleh kepemimpinan yang transformasional dan kolaboratif.

Pada saat yang sama, Kabupaten Badung menggabungkan "awig-awig" dan filosofi "Tri Hita Karana" dalam tata kelola pembangunan dan pariwisatanya. Sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan lingkungan, kepemimpinan yang inklusif dan berperan sebagai katalisator mendorong kolaborasi antara pemerintah, desa adat, pelaku pariwisata, dan masyarakat. Secara keseluruhan, ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada kebijakan teknokratis; keberhasilan pembangunan tersebut juga bergantung pada bagaimana pemerintah daerah menginternalisasi prinsip-prinsip budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menerapkan kepemimpinan yang responsif, kolaboratif, dan adaptif.

Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Meskipun terbukti bahwa integrasi kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif membantu pembangunan daerah, setiap wilayah masih menghadapi tantangan yang berbeda. Sangat penting bagi Kabupaten Banyuwangi untuk mengimbangi pengembangan pariwisata dengan keberlanjutan kawasan hutan. Merespons perubahan sosial yang berkembang di masyarakat, Kabupaten Sleman harus terus memperkuat mitigasi bencana Gunung Merapi. Saat ini, Kabupaten Badung menghadapi tantangan dari globalisasi dan komersialisasi budaya. Untuk mengimbangi pertumbuhan pariwisata dengan pelestarian identitas lokal, mereka harus melakukannya.

Temuan tersebut memiliki banyak konsekuensi untuk kebijakan. Pertama, perangkat desa dan pemimpin lokal harus diperkuat secara konsisten dengan pelatihan kepemimpinan adaptif agar mereka dapat menanggapi perubahan dan mendorong inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, kelembagaan adat dan mekanisme musyawarah harus diperkuat agar mereka tidak hanya menjaga tradisi tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam proses perencanaan dan inovasi pembangunan. Ketiga, kearifan lokal harus lebih jelas dimasukkan ke dalam RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Untuk memastikan bahwa arah pembangunan tetap kontekstual, berdasarkan ciri sosial-budaya masyarakat, dan berorientasi pada keberlanjutan daerah, langkah ini sangat penting.

4 Kesimpulan dan Saran

Studi yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Sleman, dan Badung menunjukkan bahwa kepemimpinan adaptif dan kearifan lokal adalah komponen penting dalam mendukung pembangunan berbasis potensi daerah. Sebagai landasan untuk menciptakan dan menerapkan kebijakan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan, ketiga wilayah dapat memanfaatkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan karakteristik lokal. Kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi, dan mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat memperkuat metode ini.

Integrasi meningkatkan partisipasi publik, resiliensi sosial, dan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada kemampuan teknokratis; juga diperlukan kemampuan untuk mengelola nilai lokal dan menyesuaikan kebijakan dengan perubahan. Akibatnya, model pembangunan yang memadukan kearifan lokal dan kepemimpinan adaptif dapat dianggap sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5 Daftar Pustaka

- Afriyansyah, B. (2018). Pemetaan potensi pariwisata dan pembangunan masyarakat Dalil berbasis fungsi hutan, kearifan lokal dan tata kelola pemerintah Desa Dalil. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 2(1). <https://doi.org/10.33019/jpu.v2i1.128>
- Akbar, D., Putra, B. M., Purnawan, H., Supriyono, S., Akhir, A. F. P., Parwito, P., & Waliamin, J. (2022). Analysis of village fund allocation management in Kaur District year 2021 (Study in Guru Agung 1 Village, North Kaur District, Kaur Regency, Bengkulu Province). *Journal of Social Science and Humanities*, 1(1), 1–6.
- Angkasa, Z., Alexsander, A., Harmiati, H., Purnawan, H., & Parwito, P. (2022). Analysis of community participation in maritime tourism productivity development based on social capital (Study in Padang Betuah Village, Pondok Kelapa District, Central Bengkulu Regency). *Journal of Social Science and Humanities*, 1(1), 7–12.
- Ari Atu Dewi, A. A. I. (2018). Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat: Community based development. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2). <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.163-182>
- Hidayat, H. Y., Febriani, D. A., & Ravanelli, D. M. (2020). Tinjauan dynamic governance dalam mendukung pengembangan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan menuju wisata halal. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 14(2). <https://doi.org/10.20961/sp.v14i2.39289>
- Hidayat, N. (2018). Pemberdayaan masyarakat menuju desa wisata berbasis kearifan lokal di Desa Kundi Bersatu Kabupaten Bangka Barat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 4(1). <https://doi.org/10.33019/jpu.v4i1.160>
- Kariada, N. (2021). Kajian potensi mata air dan kearifan lokal masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya air. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang*.
- Kurnia, F., Andreas, A., Tinumbia, N., Herzanita, A., Arini, R. N., Lestari, R. T., & Ariyani, D. (2023). Peningkatan kesadaran konstruksi tahan gempa di Desa Sukagalih, Kecamatan Jonggol berbasis kearifan lokal. *Jurnal JANATA*, 2(2). <https://doi.org/10.35814/janata.v2i2.4525>
- Perdana, F. R. (2019). Ketahanan keluarga berbasis kearifan lokal penunjang industri kreatif pariwisata. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2). <https://doi.org/10.30738/sosio.v5i2.4730>
- Putra, Y. D., Mulyadi, M., Purnawan, H., Parwito, P., Yanto, H. N., Aprianty, H., & Dani, R. (2022). Implementation of Village Regulation Number 05 of 2020 concerning Village Revenues and Expenditures (APBDes) in 2020: Study in Tanjung Seluai Village, South Seluma District, Seluma Regency. *Journal of Social Science and Humanities*, 1(2), 63–68. <https://doi.org/10.58222/jossh.v1i2.123>

- Sugiantiningsih, A. A. P., Yowana, I. M. A., Yasa, I. G. P., Yunita, I. M., Noor, M., & Saputra, I. G. O. (2023). Konstruksi konsep pengelolaan keamanan nasional berbasis masyarakat adat di Bali. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(3). <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i3.53958>
- Sunyoto, A. (2022). Peningkatan daya saing global UMKM dengan Gusjigang sebagai basis kearifan lokal. In *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis UMK Ke-42: Pendidikan Tinggi Berdaya Saing untuk Peningkatan Mutu*